

Sandra Dewi Tak Tahu Soal Mobil Mewah

JAKARTA (KR) - Majelis hakim kembali mendengarkan kesaksian selebritas sekaligus istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015/2022. Sandra mengaku tidak pernah ikut campur dalam pembelian berbagai mobil mewah milik suaminya yang disita penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus tersebut.

"Soal pembelian mobil itu yang membeli suami. Uangnya juga uang dia, saya tidak tahu," kata Sandra dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (21/10).

Sebelumnya dalam surat dakwaan, Harvey diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari uang hasil korupsi timah. Menurut jaksa hal itu antara lain untuk membeli sejumlah mobil mewah. Meski demikian, Sandra mengatakan bahwa salah satu unit mobil mewah milik suaminya, yakni Mini Cooper yang disita penyidik memiliki nomor pelat khusus. Hal ini karena memakai inisial Sandra, yakni 883-SDW.

Jaksa penuntut umum Kejagung tidak hanya mengklarifikasi mobil Mini Cooper. Namun, terdapat pula sejumlah mobil mewah yang diklarifikasi kepada Sandra dan Harvey, yaitu Toyota Alphard Vellfire, Rolls Royce, Porsche, hingga Ferrari.

Pada kesempatan sama, Harvey Mo-

eis mengaku membeli sendiri berbagai mobil mewah itu. "Saya yang beli," ujarnya.

Sandra Dewi kembali dihadirkan majelis hakim untuk mengonfirmasi TPPU yang didakwakan kepada Harvey Moeis dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015/2022.

Pada Kamis (10/10), Sandra Dewi juga telah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang pemeriksaan. Kasus dugaan korupsi timah antara lain menyeret Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) dan Suparta selaku Direktur Utama PT RBT sebagai terdakwa. (Ful)-d

Gelar Bulan Inklusi Keuangan

DINKOP DAN UKM DIY



KR-Istimewa

YOGYA (KR) - Menyambut Hari Inklusi Keuangan, Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UKM) DIY didukung Dana Keistimewaan dan berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) pada Rabu, 23 Oktober 2024 di Royal Ambarukmo Yogyakarta Hotel.

Kepala Dinkop dan UKM DIY Sri Nurkatsiwi mengatakan, berkaitan dengan BIK tersebut, tahun ini SiBakul mengambil tema *Financetopia* yang merupakan gabungan dari kata *Finance* dan *Utopia*. "Makna tema ini suatu dunia atau komunitas keuangan yang nyaris sempurna," jelasnya, Senin (21/10).

Siwi menjelaskan, dengan tagline *Akses Keuangan Merata*, diharapkan SiBakul *Financetopia* melalui program-programnya dapat memberikan

Sri Nurkatsiwi

kesempatan emas bagi UMKM di DIY untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

"Dengan hadirnya lebih dari 500 UMKM dan 16 LJK, acara ini akan menjadi ajang yang luar biasa untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan bisnis," jelas Siwi.

Eko Yuniarto, Kepala OJK DIY menyebut tagline *Akses Keuangan Merata*, UMKM Sejahtera selaras dengan tema BIK 2024. "Agenda ini di-

harapkan memberikan kesempatan bagi UMKM di DIY untuk mendapatkan informasi produk dan layanan jasa keuangan dari berbagai lembaga jasa keuangan. Acara ini menjadi event luar biasa untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM," jelasnya.

Ibrahim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia menyebut, pemerataan penyediaan akses layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau bagi seluruh masyarakat menjadi insiatif yang terus didorong Pemerintah untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sejak peneta-
strategi keuangan nasional inklusi di 2016, tingkat inklusi keuangan terus meningkat dengan naik 3 poin persentase. Ada capaian 3 indikator utama yaitu jangkauan akses penggunaan, produk keuangan dan kualitas yang mengalami peningkatan signifikan. (Fhx)-d

Prabowo

Sementara siang harinya, Prabowo melantik sebanyak 55 pejabat Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 di Istana Merdeka. Agenda pelantikan itu didasari atas Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor Keppres Nomor 73M/2024 Tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken Prabowo per 20 Oktober 2024. Agenda pelantikan wakil menteri tersebut diawali dengan pelantikan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet periode 2024-2029. (Ant)

- Berikut ini daftar 55 wakil menteri Kabinet Merah Putih:**
1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus
 2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan: Otto Hasibuan
 3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto
 4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Andriantoro
 5. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto
 6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Rika Halolek
 7. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta
 8. Wakil Menteri Luar Negeri: Armanata Kristiyawan Nasir
 9. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Hafas Ogroseno
 10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Emawanto
 11. Wakil Menteri Agama: Muhamamd Syaifei
 12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej
 13. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugianto
 14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan: Silmy Karim
 15. Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono
 16. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
 17. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimayu
 18. Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ulhaq
 19. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atib Atikul Hayat
 20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Fauzan
 21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Stella Christie
 22. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha
 23. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono
 24. Wakil Menteri Sosial: Agus Priyono
 25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Imanuel Ebnezer
 26. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Ariyani

- Sambungan hal 1**
27. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Zulfikar Ahmad Tawalla
 28. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza
 29. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro
 30. Wakil Menteri ESDM: Yuliot
 31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti
 32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah
 33. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria
 34. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi
 35. Wakil Menteri Perhubungan: Sultana
 36. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo
 37. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria
 38. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono
 39. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar
 40. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didad Gerdyawan
 41. Wakil Menteri ATR/BPN : Ossya Damawan
 42. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas: Februnus Alfianto
 43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Purwadi Aryanto
 44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo
 45. Wakil Menteri BUMN: Aminudin Maruf
 46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria
 47. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
 48. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH: Diaz Faisal Malik Hendropriyono
 49. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM: Todo Tua Pasaribu
 50. Wakil Menteri Koperasi: Feri Joko Juliantono
 51. Wakil Menteri Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah: Elfy Muriza
 52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Emawati
 53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Irene Umar
 54. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan
 55. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat.

Tantangan

dan program lainnya pasti membutuhkan banyak sekali belanja negara. Sumber utama pendapatan negara saat ini sekitar 83% ditopang oleh sektor perpajakan sehingga tantangan sektor ini harus benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan baru.

Pemerintahan Prabowo Gibran dalam visi misi Asta Citanya menargetkan penerimaan pajak yang sangat besar dengan rasio pajak mencapai 23%. Sebagai perbandingan, rasio pajak Indonesia saat ini berkisar sekitar 10%, jauh di bawah standar global sekitar 15-17%. Sebagai informasi, rasio pajak adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan produk domestik bruto suatu negara. Rasio pajak Indonesia saat ini memang termasuk yang terendah di ASEAN.

Upaya dalam mengejar target rasio pajak tentu harus dilakukan. Rasio pajak yang rendah membuat penerimaan pajak menjadi rendah sehingga dapat mengganggu rencana program pemerintah. Namun demikian, menaikkan rasio pajak tentu tidak bisa serta merta dilakukan dengan hanya menargetkan peningkatan penerimaan semata, namun juga harus mengupayakan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan rasio pajak yang hanya berpikir pada aspek pertumbuhan penerimaan dapat memberikan dampak negatif pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Data ekonomi 5 bulan terakhir menunjukkan terjadi deflasi secara beruntun. Hal ini memperlihatkan kondisi daya beli masyarakat yang menurun. Penurunan daya beli ini sejalan juga dengan penurunan kinerja dari perusahaan serta PHK yang juga semakin banyak. Jika dalam kondisi ini, peningkatan penerimaan pajak dilakukan dengan cara seperti semakin gencarnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian dan pemeriksaan pajak, baik melalui audit pajak maupun SP2DK maka dampaknya mungkin buruk bagi perkembangan bisnis dan ekonomi.

Pasal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa PPN yang semula 11% harus naik menjadi 12%. Kenaikan PPN 1% ini memang akan memberikan kenaikan penerimaan secara instan sekitar Rp 52 Triliun, namun dalam kondisi ekonomi yang menurun dan daya beli masyarakat lemah, menaikkan PPN dapat menjadi bumerang ekonomi. Pemerintah harus mengalkulasi apakah kenaikan ini dapat ditunda atau dilanjutkan dengan berbagai dampak negatif yang mungkin muncul.

Pemerintah baru harus ekstra hati-hati dalam masa peralihan ini, karena kondisi ekonomi nasional dan dunia yang masih rentan. Berbagai upaya meningkatkan penerimaan pajak harus didukung, namun upaya ini jangan mengganggu iklim bisnis

dan investasi yang dibangun. Bagaimanapun juga, sebagai negara berkembang, investasi adalah salah satu tonggak penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi yang tumbuh berkualitas tentu akan menjadi pendorong penerimaan pajak yang optimal.

Optimalisasi sektor perpajakan harus didorong untuk melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi secara bersamaan. Sumber-sumber pajak yang belum digarap optimal harus ditemukan, sehingga tidak hanya terus mengejar wajib pajak yang secara formal sudah patuh. Penggunaan coretax administration system yang canggih pada tahun 2025 mendatang diharapkan dapat membantu DJP memperluas basis pajak, menambah jumlah wajib pajak potensial, serta meningkatkan peran pengawasan sehingga kepatuhan meningkat.

Sesuai dengan theory opportunity, jika seseorang sulit mendapatkan celah (opportunity) untuk tidak patuh maka wajib pajak akan terpaksa patuh. Artinya, dengan sistem pengawasan modern yang andal tentu dapat memaksa wajib pajak untuk patuh secara formal dan materiil. Pemanfaatan teknologi informasi serta big data oleh DJP (atau Badan Penerimaan Negara di era Presiden Prabowo) akan menjadi kunci kesuksesan pemerintah mengejar peningkatan rasio pajak.

(Penulis, dosen Departemen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY)-d

BPRS HIK MCI SEBAGAI LKS-PWU Tingkatkan Wakaf Uang untuk Kemaslahatan Umat

YOGYA (KR) - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Mitra Cakupan Indonesia (MCI) resmi diluncurkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) di Banking Hall BPRS HIK MCI, Senin (21/10). Hadir Dewan Komisaris BPRS HIK MCI Prof Dr Edy Suandi Hamid MEC, Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dede Haris Sumarno MM, Direktur Utama BPRS HIK MCI Khold MM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PVM) DIY, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, para nazhir, serta nasabah prioritas BPRS HIK MCI.

"Alhamdulillah, BPRS HIK MCI semakin berkembang pesat dan menjadi BPRS de-



KR-Istimewa

Prof Dr Edy Suandi Hamid pada launching BPRS HIK MCI sebagai LKS-PWU.

ngan aset terbesar di Yogyakarta. Kepercayaan masyarakat ini merupakan hasil dari pengelolaan yang profesional, integritas, dan komitmen yang tinggi. Saya juga bangga atas capaian jumlah nasabah yang kini mendekati angka 10.000," kata Edy Suandi Hamid.

Dede Haris menyampaikan, saat ini ada sekitar 50 LKS-PWU, mayoritas di antaranya

BPRS. Namun, pergerakan wakaf tunai belum sesuai harapan. "Literasi wakaf masih berada di bawah zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), dan para nazhir harus lebih profesional agar dapat mengelola wakaf dengan baik," jelasnya.

Menurut Khold, beberapa program wakaf unggulan disediakan BPRS HIK MCI bersama nazhir. (Ria)-d

Dinamika Kebijakan dan Transisi Pemerintahan Baru

Ferri Wicaksono, SIP MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta

TRANSISI pemerintahan baru merupakan salah satu momen penting dalam dinamika politik suatu negara. Di dalam sistem demokrasi, perpindahan kekuasaan ini tidak hanya menjadi simbol dari perubahan yang damai, tetapi juga mencerminkan perubahan kebijakan yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pemerintahan baru biasanya membawa agenda yang

berbeda dari pemerintahan sebelumnya, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi.

Namun, transisi ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan besar dalam mempertahankan kesinambungan kebijakan yang ada sekaligus mengembangkan kebijakan baru yang sesuai dengan visi pemerintahan baru.

Dinamika Kebijakan dalam Transisi Pemerintahan

Setiap pemerintahan memiliki prioritas yang berbeda-beda tergantung pada visi dan misi pemimpin yang terpilih. Pemerintahan baru sering kali berupaya untuk segera mewujudkan janji kampanye dengan merombak atau mengubah kebijakan yang diterapkan oleh pendahulunya. Dalam hal ini, dinamika kebijakan terlihat jelas terutama dalam penyesuaian terhadap kondisi politik, ekonomi,

dan sosial yang terkini.

Transisi ini membutuhkan kemampuan untuk menyeimbangkan antara kesinambungan kebijakan yang telah berjalan dengan dorongan untuk menerapkan kebijakan baru. Program-program besar, seperti infrastruktur atau kesejahteraan sosial, yang sudah berlangsung tidak dapat dihentikan begitu saja tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kesinambungan kebijakan menjadi elemen penting untuk menjaga stabilitas dalam masa transisi.

Tantangan dalam Transisi Pemerintahan Baru

Waktu sering kali menjadi tantangan utama dalam masa transisi pemerintahan. Publik berharap agar pemerintahan baru segera membuat perubahan, namun kebijakan yang efektif

membutuhkan perencanaan matang dan pelaksanaan yang cermat. Resistensi dari birokrasi menjadi tantangan utama. Birokrasi yang bekerja di bawah pemerintahan sebelumnya cenderung resisten terhadap perubahan, terutama jika perubahan tersebut menyentuh kepentingan yang telah mapan. Dalam hal ini, birokrasi yang lamban atau tidak adaptif bisa menghambat jalannya kebijakan baru.

Selain itu, perubahan kebijakan yang drastis bisa menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat dan sektor ekonomi. Misalnya, kebijakan ekonomi baru yang berbeda dari pendekatan sebelumnya dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan krisis kepercayaan di pasar. Oleh karena itu, pemerintah baru perlu mengelola komunikasi dengan baik, menjelaskan alasan dan tujuan dari

setiap kebijakan baru yang diterapkan, serta menjaga stabilitas ekonomi selama proses transisi berlangsung.

Peluang dalam Transisi Pemerintahan Baru

Di balik tantangan yang ada, transisi pemerintahan juga menawarkan banyak peluang, terutama untuk melakukan reformasi kebijakan. Pemerintahan baru biasanya memiliki dukungan politik yang kuat pada awal masa jabatannya, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperkenalkan perubahan yang signifikan. Transisi pemerintahan juga memberikan peluang untuk memperbaiki kebijakan yang kurang efektif dari pemerintahan sebelumnya. Dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan lama, pemerintahan baru bisa merancang kebijakan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, transisi

pemerintahan membawa harapan baru bagi masyarakat. Pemimpin yang baru sering kali dianggap mampu membawa perubahan positif, yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Strategi Mengelola Dinamika Kebijakan dalam Transisi Pemerintahan

Untuk mengelola dinamika kebijakan selama transisi pemerintahan, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, pemerintahan baru harus fokus pada kesinambungan kebijakan. Program yang sudah berjalan dengan baik sebaiknya dilanjutkan dengan penyesuaian sesuai kebutuhan, untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Kedua, pemerintah perlu melibatkan birokrasi secara aktif dalam proses transisi. Sosialisasi dan pelatihan kebijakan kepada

aparatur negara penting agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan. Ketiga, pemerintahan baru harus mengelola ekspektasi publik dengan bijak. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan kajian yang matang dan mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang. Komunikasi yang baik penting agar publik dapat memahami tujuan dan alasan kebijakan yang diambil.

Transisi pemerintahan baru adalah periode yang krusial dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Kunci keberhasilan transisi pemerintahan terletak pada kesinambungan kebijakan, kolaborasi dengan birokrasi, dan pengelolaan ekspektasi publik yang baik.

Mari kita berkontribusi untuk negeri!



Prakiraan Cuaca		22 Oktober 2024				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Grafis : Arko

